



## **Model Collaborative Governance dan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia**

### ***Collaborative Governance Model and Election Implementation in Indonesia***

**Raudhatul Jannah<sup>1</sup>, Fatiyyatul Awfar<sup>2</sup>, Afrijal<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Pemerintahan, Fakultas Universitas Syiah Kuala

Email : [raudhatuljannah.rj2022@gmail.com](mailto:raudhatuljannah.rj2022@gmail.com)<sup>1</sup>, [fatiyyatulawfar01@gmail.com](mailto:fatiyyatulawfar01@gmail.com)<sup>2</sup>, [afrijal@usk.ac.id](mailto:afrijal@usk.ac.id)<sup>3</sup>

#### Article Info

##### Article history:

Received : 23-04-2026

Revised : 25-04-2026

Accepted : 27-04-2026

Published : 29-04-2026

#### Abstract

*The collaborative governance model is a governance approach that emphasizes cooperation between the government, election organizing institutions, political parties, community organizations, and the wider community in the election process. This approach is considered crucial for strengthening the quality of democracy and increasing transparency, accountability, and public participation in every stage of elections in Indonesia. Through open and participatory cooperation, various parties can play a role in maintaining election integrity and ensuring that the election process runs honestly, fairly, and democratically. This study uses a literature study method by analyzing various theories and comparing scientific sources discussing the concept of collaborative governance and the practice of election administration in Indonesia. The analysis was conducted to understand how cooperation patterns between institutions and the community can support more effective and democratic election administration. The results show that the application of the collaborative governance model in election administration can strengthen coordination between institutions, increase public trust, and encourage community participation in monitoring the election process. With this collaboration between election organizers, government, political parties, and the community, it is hoped that the election process in Indonesia will be more transparent and accountable, and able to strengthen the quality of democracy.*

**Keywords: Elections, Democracy, Collaboration**

#### Abstrak

Model collaborative governance merupakan pendekatan tata kelola yang menekankan kerja sama antara pemerintah lembaga penyelenggara pemilu partai politik organisasi masyarakat dan masyarakat luas dalam proses penyelenggaraan pemilu. Pendekatan ini dianggap penting untuk memperkuat kualitas demokrasi serta meningkatkan transparansi akuntabilitas dan partisipasi publik dalam setiap tahapan pemilu di Indonesia. Melalui kerja sama yang terbuka dan partisipatif berbagai pihak dapat berperan dalam menjaga integritas pemilu serta memastikan proses pemilihan berjalan secara jujur adil dan demokratis. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan cara menganalisis berbagai teori serta membandingkan sumber ilmiah yang membahas konsep collaborative governance dan praktik penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Analisis dilakukan untuk memahami bagaimana pola kerja sama antar lembaga dan masyarakat dapat mendukung penyelenggaraan pemilu yang lebih efektif dan demokratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model collaborative governance dalam penyelenggaraan pemilu dapat memperkuat koordinasi antar lembaga meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu. Dengan adanya kolaborasi antara penyelenggara pemilu pemerintah partai politik dan masyarakat diharapkan proses pemilu di Indonesia dapat berjalan lebih transparan, akuntabel serta mampu memperkuat kualitas demokrasi.

**Kata Kunci : Pemilu, Demokrasi, Kolaborasi**



## PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme paling penting dalam sistem pemerintahan demokratis karena melalui pemilu masyarakat dapat menyalurkan hak politiknya untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan. Dalam negara demokrasi kedaulatan berada di tangan rakyat sehingga pemilu menjadi sarana utama untuk mewujudkan kedaulatan tersebut secara nyata. Melalui pemilu masyarakat memiliki kesempatan untuk menentukan arah kebijakan negara serta memilih pemimpin yang dianggap mampu memperjuangkan kepentingan rakyat. Di Indonesia pemilu tidak hanya dipandang sebagai kegiatan politik yang rutin dilaksanakan setiap lima tahun tetapi juga sebagai proses penting dalam menjaga stabilitas politik serta memperkuat legitimasi pemerintahan. Oleh karena itu penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara jujur adil transparan dan akuntabel agar dapat menghasilkan pemerintahan yang benar benar mencerminkan kehendak rakyat. Pemilihan umum merupakan unsur penting dalam sistem demokrasi yang berfungsi menentukan arah pemerintahan suatu negara. Di Indonesia pelaksanaan pemilu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat 1 yang menegaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (Nurafni, 2025).

Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam sistem hukum pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan serta penguatan dari waktu ke waktu. Dalam kerangka hukum pemilu nasional, keberadaan dan peran Bawaslu diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia melibatkan berbagai lembaga yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Lembaga yang memiliki tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum yang bertugas merencanakan mengatur serta melaksanakan seluruh tahapan pemilu mulai dari pendaftaran peserta pemilu penetapan daftar pemilih hingga penghitungan dan penetapan hasil pemilu. Selain itu terdapat pula Badan Pengawas Pemilu yang berperan sebagai lembaga pengawas yang bertugas memastikan bahwa proses pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip demokrasi serta bebas dari berbagai bentuk pelanggaran. Kedua lembaga ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat (Haryani, 2023).

Meskipun berbagai lembaga telah dibentuk untuk mengatur serta mengawasi pelaksanaan pemilu dalam praktiknya penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemilu yang dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemilu atau adanya rasa ketidakpercayaan terhadap proses politik yang berlangsung. Selain itu berbagai permasalahan lain seperti penyebaran informasi yang tidak benar konflik kepentingan antar aktor politik serta berbagai bentuk pelanggaran pemilu juga sering terjadi dalam setiap pelaksanaan pemilu. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak hanya membutuhkan kerja keras dari lembaga penyelenggara tetapi juga memerlukan keterlibatan serta dukungan dari berbagai pihak dalam masyarakat. Keterlibatan politik warga negara menjadi unsur yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan sistem demokrasi khususnya ketika Indonesia menghadapi berbagai tantangan menjelang



pelaksanaan Pemilu tahun 2024 (Ainurrizqi, 2025).

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut diperlukan suatu pendekatan tata kelola pemerintahan yang mampu melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemilu. Salah satu pendekatan yang semakin banyak digunakan dalam pengelolaan kebijakan publik adalah model collaborative governance yang menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah lembaga publik sektor swasta organisasi masyarakat serta masyarakat luas dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Kerja sama antara lembaga penyelenggara pemilu dan berbagai organisasi kemasyarakatan dalam mendorong keterlibatan politik masyarakat di Indonesia memperlihatkan dampak yang baik tetapi tetap membutuhkan penguatan pada aspek kelembagaan. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa berbagai permasalahan publik tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu lembaga saja tetapi memerlukan kerja sama serta koordinasi antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap permasalahan tersebut (Sutanto, 2025).

Model collaborative governance dalam penyelenggaraan pemilu menjadi sangat penting karena proses pemilu melibatkan banyak aktor yang memiliki peran dan kepentingan yang berbeda beda. Selain lembaga penyelenggara pemilu terdapat pula partai politik sebagai peserta pemilu organisasi masyarakat sipil yang berperan dalam melakukan pengawasan serta masyarakat sebagai pemilih yang memiliki hak untuk menentukan pilihan politiknya. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara berbagai pihak tersebut maka proses penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan lebih efektif transparan serta mampu menciptakan suasana politik yang lebih sehat dan demokratis. Penguatan mekanisme kerja sama dapat diwujudkan melalui pembentukan forum komunikasi antar sektor yang dilaksanakan secara berkala penyusunan prosedur operasional standar yang bersifat kolaboratif, serta penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah koordinasi dan mempercepat proses tanggapan (Kusumo, 2025).

Penerapan collaborative governance juga dapat membantu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemilu. Ketika berbagai pihak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan serta pengawasan maka setiap tahapan pemilu akan lebih terbuka terhadap pengawasan publik. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merusak integritas pemilu. Selain itu keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu juga dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap proses demokrasi sehingga masyarakat akan lebih aktif dalam menjaga serta mengawasi jalannya pemilu. Kolaborasi antara berbagai aktor dalam penyelenggaraan pemilu juga dapat meningkatkan efektivitas koordinasi antar lembaga yang terlibat. Dalam praktiknya penyelenggaraan pemilu membutuhkan kerja sama yang erat antara lembaga penyelenggara pemilu pemerintah daerah aparat keamanan serta berbagai organisasi masyarakat. Tanpa adanya koordinasi yang baik berbagai tahapan pemilu dapat mengalami hambatan yang dapat memengaruhi kelancaran proses pemilu secara keseluruhan. Oleh karena itu pendekatan collaborative governance dapat menjadi strategi yang efektif untuk memperkuat komunikasi serta koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.

Di Indonesia praktik kolaborasi dalam penyelenggaraan pemilu sebenarnya telah mulai diterapkan melalui berbagai bentuk kerja sama antara lembaga penyelenggara pemilu pemerintah daerah organisasi masyarakat serta lembaga pemantau pemilu. Berbagai organisasi masyarakat sipil misalnya sering terlibat dalam kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat serta melakukan



pemantauan terhadap proses pemilu untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara jujur dan adil. Selain itu lembaga penyelenggara pemilu juga sering bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu melalui berbagai program sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kepemimpinan yang bersifat kolaboratif memiliki tujuan untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih aktif dalam pelaksanaan pemilu melalui berbagai upaya, seperti kegiatan edukasi politik dan penyelenggaraan dialog terbuka dengan publik (Nurfadilla, 2024).

Namun demikian penerapan collaborative governance dalam penyelenggaraan pemilu masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan kepentingan antara berbagai aktor yang terlibat dalam proses pemilu yang dapat menimbulkan konflik atau persaingan yang tidak sehat. Selain itu masih terdapat keterbatasan dalam hal koordinasi komunikasi serta pemahaman mengenai pentingnya kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan. Jika tidak dikelola dengan baik berbagai perbedaan kepentingan tersebut dapat menghambat upaya untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik dan lebih demokratis. Untuk menanggulangi persoalan tersebut Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu telah menetapkan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan kampanye melalui media digital. Meskipun demikian, proses pengawasan terhadap isi kampanye di media social masih menghadapi sejumlah hambatan baik yang berkaitan dengan keselarasan regulasi maupun keterbatasan fasilitas pengawasan yang tersedia (Saputri, 2025).

Berdasarkan berbagai kondisi tersebut maka penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana penerapan model collaborative governance dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Kajian ini diperlukan untuk memahami bagaimana kerja sama antara lembaga penyelenggara pemilu pemerintah partai politik organisasi masyarakat serta masyarakat dapat memperkuat kualitas proses demokrasi. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara berbagai pihak diharapkan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan secara lebih transparan akuntabel dan demokratis sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik serta memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum merupakan suatu aktivitas politik yang dijalankan oleh individu maupun kelompok dalam kehidupan bernegara. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan suara serta menentukan pemimpin baru yang akan memegang amanah dalam menjalankan pemerintahan pada periode selanjutnya. Partisipasi tersebut mencerminkan peran aktif warga negara dalam proses demokrasi, karena melalui pemilu masyarakat memiliki kesempatan untuk menyalurkan aspirasi, menyatakan pilihan politik, serta ikut menentukan arah kebijakan negara di masa yang akan datang (Hidayat, 2025).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kepustakaan atau library research yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi dari sumber sumber tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian. Studi kepustakaan dilakukan melalui kegiatan menelusuri literatur membaca serta mengkaji berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian mengenai model collaborative governance dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah hasil penelitian terdahulu peraturan perundang undangan serta laporan resmi dari lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilihan



Umum Bawaslu. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi atau content analysis yang bertujuan untuk menelaah secara mendalam berbagai konsep teori serta temuan penelitian yang berkaitan dengan collaborative governance dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam proses analisis data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama yaitu konsep collaborative governance peran lembaga penyelenggara pemilu serta bentuk kolaborasi antara pemerintah lembaga penyelenggara pemilu dan masyarakat dalam proses pemilu. Pengelompokan tersebut dilakukan agar setiap informasi dapat dianalisis secara sistematis sehingga peneliti dapat memahami secara menyeluruh bagaimana penerapan model collaborative governance dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia serta bagaimana kolaborasi antara berbagai aktor mampu mendukung terciptanya penyelenggaraan pemilu yang transparan akuntabel dan demokratis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Collaborative Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan**

Collaborative governance merupakan suatu pendekatan dalam tata kelola pemerintahan yang menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap keterbatasan model pemerintahan tradisional yang cenderung bersifat hierarkis dan berpusat pada pemerintah semata. Dalam praktiknya, collaborative governance menempatkan berbagai aktor sebagai mitra yang memiliki peran dan tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan kebijakan publik. Pendekatan ini diyakini mampu menciptakan proses pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Kerja sama kolaboratif memberikan peluang bagi berbagai pihak untuk saling berkoordinasi dalam mewujudkan sasaran yang sama sehingga mampu melahirkan pemecahan masalah yang lebih menyeluruh serta memiliki keberlanjutan yang lebih baik (Fataruba, 2025).

Dalam konteks pemerintahan modern, collaborative governance menjadi salah satu strategi yang efektif untuk mengatasi berbagai persoalan publik yang kompleks. Permasalahan sosial, politik, dan ekonomi pada era globalisasi sering kali tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan kapasitas berbeda agar kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai aktor lain juga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan karena melibatkan berbagai perspektif dan pengetahuan yang berbeda. Secara teoritis, collaborative governance memiliki beberapa prinsip utama, antara lain partisipasi aktif para pemangku kepentingan, kesetaraan dalam proses pengambilan keputusan, komunikasi yang terbuka, serta adanya kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Kepercayaan menjadi faktor penting dalam membangun kolaborasi yang efektif karena tanpa adanya kepercayaan, proses kerja sama akan sulit berjalan secara optimal. Selain itu, collaborative governance juga menuntut adanya komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

Dalam sistem pemerintahan demokratis, collaborative governance menjadi semakin relevan karena demokrasi pada dasarnya menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan. Melalui mekanisme kolaborasi, masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang turut berkontribusi dalam merumuskan



serta mengawasi kebijakan publik. Hal ini dapat memperkuat legitimasi pemerintah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Pendekatan ini memberikan peluang untuk memanfaatkan potensi atau kemampuan serta wawasan dari berbagai pihak sehingga hasil penyelesaian yang diperoleh menjadi lebih fleksibel dan kreatif serta juga mampu menanggapi kebutuhan masyarakat secara lebih tepat (Sakir, 2025).

Di Indonesia, penerapan collaborative governance mulai berkembang seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif. Berbagai kebijakan publik saat ini tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta sektor swasta. Pola kerja sama ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

## **2. Peran Lembaga Penyelenggara Pemilu dalam Kerangka Collaborative Governance**

Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi karena melalui pemilu masyarakat dapat menyalurkan hak politiknya untuk memilih pemimpin serta wakil rakyat. Agar pemilu dapat berjalan secara jujur dan adil, diperlukan lembaga penyelenggara yang memiliki integritas, independensi, serta profesionalitas. Di Indonesia, penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh beberapa lembaga utama, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga ini memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam memastikan proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi. Pelaksanaan pemilihan umum diarahkan untuk mewujudkan proses pemilu yang demokratis melalui kinerja lembaga penyelenggara yang memiliki integritas serta bersikap profesional sehingga pelaksanaan pemilu dapat berlangsung dengan dasar kepastian hukum dan menjunjung tinggi prinsip keadilan (Silalahi, 2022).

Dalam kerangka collaborative governance, lembaga penyelenggara pemilu tidak hanya bekerja secara mandiri, tetapi juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Kerja sama tersebut mencakup koordinasi dengan pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, media massa, serta masyarakat luas. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, serta dapat dipercaya oleh publik. Salah satu bentuk kemajuan dari perkembangan teknologi tersebut adalah munculnya media massa. Kehadiran media massa mampu memberikan pengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat terutama dalam bidang politik (Mulyadi, 2025).

KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis pemilu memiliki peran penting dalam membangun kerja sama dengan berbagai pihak. Dalam proses penyelenggaraan pemilu, KPU tidak hanya mengatur tahapan pemilu, tetapi juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tingkat partisipasi pemilih dapat meningkat. Melalui kerja sama dengan organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, serta media massa, KPU dapat menyampaikan informasi mengenai pentingnya pemilu serta prosedur pelaksanaan pemungutan suara. Tanggung jawab KPU adalah mempersiapkan berbagai sarana maupun mekanisme yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun sehingga tercapai kehidupan demokrasi di Indonesia (Zairudin, 2022).



Sementara itu, Bawaslu memiliki peran utama dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu tidak hanya mengandalkan aparat pengawas internal, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui mekanisme pengawasan partisipatif. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, potensi pelanggaran dapat dideteksi lebih awal sehingga integritas pemilu dapat terjaga. Di sisi lain, DKPP berperan dalam menjaga etika serta integritas penyelenggara pemilu. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

### **3. Kolaborasi antara Pemerintah Masyarakat dan Lembaga Independen dalam Penyelenggaraan Pemilu**

Keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya bergantung pada kinerja lembaga penyelenggara, tetapi juga pada keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap proses demokrasi. Dalam kerangka collaborative governance, penyelenggaraan pemilu melibatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai lembaga independen. Kolaborasi ini menjadi penting karena pemilu merupakan proses politik yang kompleks dan membutuhkan dukungan dari berbagai sektor. Hal yang tidak kalah penting adalah memperkuat sinergi antara KPU, Bawaslu, dan MK melalui pertemuan konsultatif yang dilaksanakan secara berkala. Pertemuan tersebut dapat berfungsi sebagai ruang dialog untuk mengatasi kemungkinan tumpang tindih kewenangan sekaligus memastikan seluruh lembaga bergerak menuju sasaran yang sama yaitu terselenggaranya pemilu yang demokratis serta berintegritas (Erawan, 2025).

Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan dukungan administratif serta sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilu. Dukungan tersebut dapat berupa penyediaan anggaran, fasilitas logistik, serta dukungan kebijakan yang memungkinkan pemilu dapat dilaksanakan secara efektif. Meskipun demikian, pemerintah tidak boleh mencampuri independensi lembaga penyelenggara pemilu agar proses pemilu tetap berjalan secara netral. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu. Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas terhadap jalannya pemilu. Melalui partisipasi aktif masyarakat, berbagai potensi pelanggaran dapat dilaporkan sehingga proses pemilu dapat berlangsung secara lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, berbagai lembaga independen seperti organisasi masyarakat sipil, lembaga pemantau pemilu, serta media massa juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam memastikan integritas pemilu. Lembaga pemantau pemilu misalnya, berperan dalam mengawasi proses pemilu secara independen serta memberikan laporan mengenai berbagai temuan di lapangan. Sementara itu, media massa berfungsi sebagai sarana informasi yang dapat menyampaikan perkembangan pemilu kepada masyarakat secara luas. Kolaborasi antara berbagai aktor tersebut dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih kuat serta meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga independen, potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu dapat diminimalkan sehingga proses demokrasi dapat berjalan secara lebih adil.



#### **4. Implementasi Model Collaborative Governance dalam Pengawasan dan Pelaksanaan Pemilu di Indonesia**

Penerapan collaborative governance dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia dapat dilihat melalui berbagai bentuk kerja sama yang melibatkan berbagai aktor. Salah satu contoh implementasi kolaborasi tersebut adalah program pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan pemilu. Melalui program ini, masyarakat didorong untuk melaporkan berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilu berlangsung. Selain itu, kerja sama antara lembaga penyelenggara pemilu dengan aparat keamanan juga menjadi bagian penting dalam memastikan keamanan selama proses pemilu berlangsung. Aparat keamanan memiliki peran dalam menjaga ketertiban serta mencegah terjadinya konflik yang dapat mengganggu jalannya pemilu. Kolaborasi ini menjadi sangat penting terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi konflik politik yang cukup tinggi. Implementasi collaborative governance juga terlihat dalam kegiatan sosialisasi serta pendidikan pemilih. Lembaga penyelenggara pemilu sering bekerja sama dengan organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, serta media massa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai pemilih sehingga tingkat partisipasi dalam pemilu dapat meningkat. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyebaran informasi palsu selama pelaksanaan pemilihan umum, penyuluhan mengenai bahaya hoaks pemilu melalui pembagian brosur dapat menjadi strategi pendidikan yang cukup efektif bagi publik (Wolon, 2024).

Di era digital saat ini, kolaborasi dalam penyelenggaraan pemilu juga melibatkan pemanfaatan teknologi informasi. Berbagai platform digital digunakan untuk menyebarkan informasi mengenai tahapan pemilu, jadwal pemungutan suara, serta prosedur pemilihan. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya mempermudah akses informasi bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan transparansi dalam proses pemilu. Dengan adanya berbagai bentuk kolaborasi tersebut, penyelenggaraan pemilu di Indonesia dapat berjalan secara lebih terbuka dan partisipatif. Implementasi collaborative governance juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam menjaga integritas pemilu.

#### **5. Tantangan dan Peluang Penerapan Collaborative Governance dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis**

Meskipun collaborative governance menawarkan berbagai keuntungan dalam penyelenggaraan pemilu, penerapannya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya ketimpangan kekuasaan antara berbagai aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi. Dalam beberapa kasus, pemerintah atau aktor politik tertentu memiliki pengaruh yang lebih besar sehingga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Selain itu, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan dalam penerapan collaborative governance. Meskipun masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengawasan serta pelaksanaan pemilu, tidak semua masyarakat memiliki kesadaran atau kapasitas untuk berpartisipasi secara aktif. Di samping itu tingkat profesionalisme para penyelenggara pemilihan umum juga sangat diperlukan agar pelaksanaan pemilu mampu menghasilkan proses yang berkualitas sebagai sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat



pada penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Jumaeli, 2021).

Tantangan lain yang dihadapi adalah munculnya berbagai bentuk pelanggaran pemilu seperti politik uang, penyebaran informasi palsu, serta penyalahgunaan kekuasaan. Fenomena ini dapat merusak integritas pemilu serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara berbagai pihak untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Ketergantungan terhadap sumber pembiayaan kampanye yang tidak terbuka turut memperburuk praktik tata kelola politik yang bersih serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga secara perlahan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik maupun lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum (Abdullah, 2022). Namun demikian, di balik berbagai tantangan tersebut terdapat pula peluang yang cukup besar untuk memperkuat penerapan collaborative governance dalam penyelenggaraan pemilu. Perkembangan teknologi informasi misalnya, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi serta partisipasi masyarakat dalam proses pemilu. Melalui berbagai platform digital, masyarakat dapat memperoleh informasi secara lebih mudah serta menyampaikan laporan mengenai berbagai pelanggaran yang terjadi.

Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya demokrasi juga menjadi peluang dalam memperkuat kolaborasi antara berbagai aktor. Semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya partisipasi dalam pemilu, maka semakin besar pula peluang untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Dengan memanfaatkan berbagai peluang tersebut serta mengatasi berbagai tantangan yang ada, collaborative governance dapat menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang lebih transparan, partisipatif, dan demokratis di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan model collaborative governance dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia memiliki peran yang penting dalam memperkuat kualitas demokrasi. Pendekatan ini menekankan kerja sama antara berbagai aktor seperti pemerintah lembaga penyelenggara pemilu partai politik organisasi masyarakat sipil media massa serta masyarakat sebagai pemilih. Melalui kolaborasi yang baik setiap pihak dapat berkontribusi dalam menjaga integritas pemilu mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan hingga pengawasan sehingga proses pemilu dapat berlangsung secara lebih transparan akuntabel dan partisipatif.

Lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu memiliki peran utama dalam memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi. Namun keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya bergantung pada kedua lembaga tersebut melainkan juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak lain seperti pemerintah organisasi masyarakat sipil lembaga pemantau pemilu serta media massa. Kolaborasi antara berbagai aktor tersebut mampu memperkuat koordinasi pengawasan serta meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dapat terus terjaga. Meskipun penerapan collaborative governance dalam penyelenggaraan pemilu masih menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan kepentingan antar aktor rendahnya partisipasi masyarakat serta munculnya berbagai bentuk pelanggaran pemilu pendekatan kolaboratif tetap memberikan



peluang besar untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ainurrizqi, A. F., & Sukmana, O. (2025). Partisipasi politik masyarakat di negara demokrasi: Studi kasus Pemilu 2024 di Indonesia. *Journal of Society Bridge*, 3(2), 72-83.
- Erawan, M. A., & Bunga, M. (2025). Harmonisasi Regulasi Pemilu dalam Konteks Pemilu Serentak 2024. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(1), 32-43.
- Haryani, R. (2023). Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Lembaga yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu. *Binamulia Hukum*, 12(1), 89-98.
- Hidayat, R. (2025). Urgensi Penguatan Partisipasi Publik dalam Pemilu: Peran KPU dan Bawaslu dalam Konteks Demokrasi Indonesia. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(3), 311-321.
- Kusumo, A. S. R., & Ma'ruf, M. F. (2025). Pola Kolaborasi dalam Pengamanan Pilkada. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(12).
- Mulyadi, D., Ce Kedzma Alvian M, S., Lananda, A., Farraz, M. I., Simbolon, C. C., & Perdana, Z. A. (2025). PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP GENERASI Z SEBAGAI UPAYA UNTUK MENDORONG PARTISIPASI AKTIF DALAM PEMILU PRESIDEN DAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI TINJAU DARI TEORI DEMOKRASI. *Jurnal Dialektika Hukum*, 7(1), 18-45.
- Nurafni, I., & Hertanto, H. (2025). Dinamika Pesta Demokrasi: Konflik dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Global Futuristik*, 3(1), 1-7.
- Nurfadilla, Y., & Nurdin, I. (2024). Kepemimpinan kolaboratif dalam momentum pemilu 2024 membangun partisipasi demokratis yang berkelanjutan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(1), 44-49.
- Sakir, A. R. (2025). Hybrid governance dalam kebijakan publik: Studi tinjauan literatur sistematis tentang kolaborasi, tantangan, dan faktor keberhasilan. *Trajectories of Public Administration*, 2(3), 276-289.
- Saputri, N. D., & Wijayanto, W. (2025). Relasi Koalisi Damai dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Moderasi Konten Kampanye Digital di Media Sosial Pada Pemilihan Umum 2024. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(2), 607-621.
- Silalahi, W. (2022). Integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu demi terwujudnya pemilu yang demokratis. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 71-83.
- Sutanto, L. A., & Setiawan, A. (2025). Kolaborasi Penyelenggara Pemilu dan Inklusivitas Politik: Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Tahap Persiapan Pilkada 2024 di Kabupaten Malang. *Journal of Governance and Policy*, 5(3), 411-430.
- Zairudin, A., Wahyudi, A., Hasyim, A. S., & Al Muntasor, E. S. (2022). Upaya Korektif Penguatan Sistem Pemilu Melalui Mekanisme Penentuan Dpt Oleh KPU. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(4), 09-22.